



**PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPIN**



# **RENCANA KERJA TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN TAPIN**

**2023**



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran I	:	Dinas Pendidikan
Lampiran II	:	Dinas Kesehatan
Lampiran III	:	RSUD Datu Sanggul
Lampiran IV	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran V	:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Lampiran VI	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Lampiran VII	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran IX	:	Dinas Sosial
Lampiran X	:	Dinas Tenaga Kerja
Lampiran XI	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	:	Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	:	Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran XV	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVI	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVII	:	Dinas Perhubungan
Lampiran XVIII	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran XIX	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran XX	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Lampiran XXI	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Lampiran XXII	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXIII	:	Dinas Perikanan
Lampiran XXIV	:	Dinas Pertanian
Lampiran XXV	:	Dinas Perdagangan
Lampiran XXVI	:	Dinas Perindustrian
Lampiran XXVII	:	Sekretariat Daerah
Lampiran XXVIII	:	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran XXIX	:	Kecamatan Piani
Lampiran XXX	:	Kecamatan Lokpaikat
Lampiran XXXI	:	Kecamatan Tapin Utara
Lampiran XXXII	:	Kecamatan Bakarangan
Lampiran XXXIII	:	Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran XXXIV	:	Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran XXXV	:	Kecamatan Hatungun
Lampiran XXXVI	:	Kecamatan Salam Babaris
Lampiran XXXVII	:	Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran XXXVIII	:	Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran XXXIX	:	Kecamatan Binuang
Lampiran XL	:	Kecamatan Bungur
Lampiran XLI	:	Inspektorat

- Lampiran XLII : Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan  
Lampiran XLIII : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Lampiran XLIV : Badan Pendapatan Daerah  
Lampiran XLV : Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 19 Juli 2023

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 21

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Petunjuk-Nya kami dapat menyusun **Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024** secara tepat waktu. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. RENJA Bappelitbang TA 2024 ini merupakan dokumen rancangan perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategi (Renstra) Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026 yang memuat gambaran umum, tugas pokok, serta tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan periode tersebut yang hendak dicapai. RENJA Bappelitbang Tahun 2024 juga menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan pemerintah daerah yang mengarahkan Tujuan dan Sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana Kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappelitbang Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan baik dari penyajian data maupun paparan isi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2024.

Rantau, Juni 2023

Kepala Bappelitbang Kab. Tapin



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. ZAINAL AQLI, ST, MT**  
**NIP. 19690214 199403 1 011**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	ii	
Daftar Tabel .....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang .....	1	
1.2 Landasan Hukum.....	2	
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5	
1.4 Sistematika Penulisan .....	5	
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA Bappelitbang.....	7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	23	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Bappelitbang .....	27	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	27	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	28	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	30	
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbang .....	31	
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN		
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	34	
BAB V PENUTUP .....		35
LAMPIRAN .....	36	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 .....	37
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan 2022 .....	25
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	42
Tabel 2.4 Usulan Program dari Pemangku Kepentingan .....	29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappelitbang .....	33
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program.....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rancangan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, baik kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rencana Kerja (Renja) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Disamping itu penyusunan Rencana Kerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, tahap penyusunan rancangan, tahap penyusunan rancangan akhir dan tahap penetapan

renja PD. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Rencana Kerja Perangkat Daerah akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Bappelitbang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tapin di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan maka dengan sendirinya BappeLitbang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergi dan komprehensif sehingga dapat mengarah pada visi, misi Kabupaten Tapin seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta pemutakhirannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengarustamaan Gender; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun dalam rangka sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah guna terwujudnya efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, dan sebagai pedoman dalam kegiatan kelitbang.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2024 yaitu:

- ✓ Sebagai panduan penyusunan rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbang.
- ✓ Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan dan pengendalian serta kelitbang yang bertanggung jawab.
- ✓ Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerjanya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja BappeLitbang Kabupaten Tapin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Rencana Kerja, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, perkiraan capaian tahun 2023, dan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappelitbang.

## BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisi tentang, Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan dan sub kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

## BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbang Tahun 2022 dan capaian Renstra Bappelitbang

Evaluasi rencana kerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, melalui pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2022 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin tahun 2022. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Bappelitbang Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Bappelitbang Kabupaten Tapin.

Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappelitbang tahun 2022 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan:

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

##### 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan dokumen perencanaan Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp32.050.000,00 dan terealisasi sebesar Rp27.148.800,00 atau sebesar 84.71%.

##### 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan laporan akhir Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp14.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.118.400,00 atau sebesar 69.07%.

##### 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### 1.2.1. Penyediaan Gaji Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini mendukung penyediaan Gaji dan tunjangan untuk ASN Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp4.907.4073.829,00 dan terealisasi sebesar Rp4.019.165.376,00 atau sebesar 81.90%.

##### 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyusunan laporan keuangan Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp24.603.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 18.750.300,00

atau sebesar 75.59%.

- 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp6.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.840.000,00 atau sebesar 43.03%.
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Sub Kegiatan ini mendukung tersedianya kebutuhan listrik dalam mendukung kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp18.389.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.054.000,00 atau sebesar 5.73%.
  - 1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Sub Kegiatan ini mendukung ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang penting untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp455.887.900,00 dan terealisasi sebesar Rp246.360.400,00 atau sebesar 54.04%.
  - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp161.618.500,00 dan terealisasi sebesar Rp102.785.800,00 atau sebesar 63.60%.
  - 1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Sub Kegiatan ini mendukung keperluan pencetakan dan pengadaan untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp29.218.400,00 dan terealisasi sebesar Rp20.289.100,00 atau sebesar 89.44%.
  - 1.3.5. Penyediaan Bahan/Material  
Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp27.626.200,00 dan terealisasi sebesar Rp17.912.400,00 atau sebesar 64.84%.
  - 1.3.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Sub Kegiatan ini mendukung dalam penyediaan jamuan untuk tamu yang melakukan kunjungan ke Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp18.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.750.000,00 atau sebesar 100.00%.
  - 1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.814.273.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.279.013.124,00 atau sebesar 70.50%.

- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang pengadaan barang maupun jasa yang diperlukan untuk menunjang kinerja Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp320.073.300,00 dan terealisasi sebesar Rp262.220.000,00 atau sebesar 81.95%.
  - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - 1.5.1. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam bidang penyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp487.612.500,00 dan terealisasi sebesar Rp401.693.123,00 atau sebesar 82.38%.
    - 1.5.2. Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp14.207.116,00 dan terealisasi sebesar Rp13.710.000,00 atau sebesar 96.50%.
    - 1.5.3. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp92.974.000,00 dan terealisasi sebesar Rp88.550.000,00 atau sebesar 73.73%.
  - 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - 1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang dalam hal menyediakan pemeliharaan Kendaraan Dinas Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp144.596.200,00 dan terealisasi sebesar Rp58.835.485,00 atau sebesar 46.22%.
    - 1.6.2. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp40.973.200,00 dan terealisasi sebesar Rp11.873.750,00 atau sebesar 28.98%.

## **II. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah” dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

## 2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur. Adapun Sub Kegiatan yang ada di dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

### 2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan kegiatan ini berupa penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur. Kendala atau permasalahan yang dihadapi yaitu dalam melaksanakan koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan melalui hybrid.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan tepat dan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp77.415.000,00 dan terealisasi sebesar Rp57.725.000,00 atau sebesar 74.57%.

### 2.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini melaksanakan asistensi atau pembinaan kepada Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur, dengan keluaran kompilasi dokumen Rencana Kerja Mitra Bidang. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yaitu:

- Pelaksanaan kegiatan ini menghadapi kendala yaitu masih ada beberapa SKPD yang terlambat melaporkan Renja PD dari jadwal yang sudah ditentukan.
- Dokumen yang disampaikan oleh SKPD masih terdapat ketidaksesuaian dengan sistematika penyusunan dokumen Renja PD.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp61.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp48.219.000,00 atau sebesar 77.84%.

### 2.1.3. Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur

Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Infrastruktur. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sub bidang mitra bidang infrastruktur ini yaitu:

- Dalam pengisian format yang ditentukan, sebagian SKPD format masih tidak terisi dengan benar.
- SDM dari SKPD yang menangani Monev Perangkat Daerah sering berganti personil, sehingga pelaporan yang disampaikan tidak optimal.
- Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp47.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.494.000,00 atau sebesar 70,59%.

#### 2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Merupakan kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan rencana daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan. Sub Kegiatan ini menghasilkan 1 dokumen SSK dan 1 dokumen RAD AMPL. Dengan dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp217.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.331.000,00 atau sebesar 93,20%.

### 2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

#### 2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyeleggaran rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas, Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi bisa dilakukan hybrid dengan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD bisa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp59.562.300,00 dan terealisasi sebesar Rp46.750.000,00 atau sebesar 78,49%.

#### 2.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kegiatan ini terkendala karena masih adanya beberapa SKPD yang terlambat memenuhi jadwal asistensi penyusunan Renja Perangkat Daerah dari

jadwal yang sudah ditentukan. Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp75.182.500,00 dan terealisasi sebesar Rp35.287.800,00 atau sebesar 46.94%.

### 2.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral; Membimbing secara teknis/fasilitasi/supervisi dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Energi dan Sumber Daya Mineral. Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang Ekonomi. Kendala dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Ekonomi:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp41.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.784.000,00 atau sebesar 71.54%.

### 2.2.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Total anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp135.611.900,- dan dapat diserap sebesar Rp104.193.700,- atau sebesar 76,82% dari total anggaran.

## 2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

### 2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

## Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik, walaupun rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid dengan peserta terbatas. Dengan keterbatasan tersebut, agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan baik, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat endemik bisa dilakukan melalui hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp77.350.000,00 dan terealisasi sebesar Rp56.449.800,00 atau sebesar 72.93%.

### 2.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang Sosial (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD). Manfaat yang diberikan dari terlaksananya sub kegiatan ini adalah:

- Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- Kendala dalam pelaksanaan sub kegiatan ini yang masih masa transisi endemik yang belum berakhir menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian renja dilaksanakan secara hybrid.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp69.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.610.000,00 atau sebesar 76.80%.

### 2.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini melaksanakan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD). Sub kegiatan ini menghasilkan 4 laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulanan Mitra Bidang Sosial. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil renja SKPD Mitra Bidang Sosial ini, terdapat kendala yaitu:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU secara manual, SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang Sosial
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator output

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp43.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.562.500,00 atau sebesar 76.80%.

#### 2.3.4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Penyelegaraan rapat-rapat koordinasi dengan mitra bidang dapat terlaksana dengan baik. Agar pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan tetap berjalan dengan lancar, maka Bappelitbang Kabupaten Tapin mengambil beberapa langkah, diantaranya:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat enndemik bisa dilakukan secara hybrid dilakukan protokol kesehatan.
- Melakukan sosialisasi dan asistensi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dan melalui media online dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp103.564.800,00 dan terealisasi sebesar Rp59.633.700,00 atau sebesar 57.56%.



### 2.3.5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi Mitra Kerja Bidang SDM (kebijakan teknis perencanaan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah). Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp79.820.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.935.000,00 atau sebesar 55.04%.

### 2.3.6. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghasilkan 4 laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan mitra bidang SDM. Pelaksanaan Sub Kegiatan ini bertujuan untuk:

- Terjalin sinergitas dan harmonisasi antar dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah urusan urusan Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Dalam menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD mitra sub bidang SDM ini terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Untuk pengisian kolom realisasi kinerja program yang diambil dari perhitungan IKU masih dilakukan secara manual, sehingga SKPD memerlukan waktu agak lama karena harus mengumpulkan data dari masing-masing Bidang.
- Pengisian kolom target, kolom indikator kinerja dan formula/rumus masih banyak yang perlu dikoreksi.
- Pengisian laporan monev masih mengalami keterlambatan dikarenakan penginputan laporan masih manual.
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas verifikator Monev pada Sub Bidang SDM.
- Penyusunan indikator output, outcome dalam format monev belum sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, untuk itu asistensi sangat diperlukan dalam upaya pendampingan OPD untuk mengecek kesesuaian indikator.

Dengan Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp48.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.890.100,00 atau sebesar 67.74%.

### III. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah” dengan Kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### 3.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

##### 3.1.1. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Pelaksanaan Forum SKPD yang dilaksanakan secara online dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara lain kondisi jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp37.213.600,00 dan terealisasi sebesar Rp37.213.600,00 atau sebesar 100.00%.

##### 3.1.2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp139.526.000,00 dan terealisasi sebesar Rp135.337.000,00 atau sebesar 97.00%.

##### 3.1.3. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu belum tersedianya data-data dalam mendukung penyusunan RKPD, terlambatnya data yang dibutuhkan dari SKPD lain, adanya perubahan sub kegiatan pada menu SIPD untuk kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 255.578.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Keterbatasan ini diakibatkan karena proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup panjang. Koordinasi antara Bappelitbang dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin dan Pusat yang memerlukan waktu yang tidak sebentar, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan sub kegiatan ini.

#### 3.1.4. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala antara jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara. Hal ini dapat diantisipasi dengan mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PT TELKOM Kabupaten Tapin untuk masalah jaringan internetnya dan PT PLN Kabupaten Tapin untuk kelancaran jaringan listrik pada saat berlangsungnya acara. Sehingga pada saat terjadi gangguan jaringan internet maupun listrik dapat segera teratasi. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp255.578.800,00 dan terealisasi sebesar Rp224.828.800,00 atau sebesar 99.67 %.

#### 3.1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp755.846.200,00 dan terealisasi sebesar Rp486.817.500,00 atau sebesar 64.36%. Dalam rangka pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah terealisasi pada Bappelitbang Kabupaten Tapin sepanjang tahun anggaran 2022 terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

- Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara online dan offline dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala diantaranya: jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.
- Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang masih terdapat kendala menyebabkan proses Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terganggu.

### 3.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

#### 3.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Belum tersedia data pembangunan secara maksimal baik secara umum maupun dari SKPD. Dengan dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp214.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.994.600,00 atau sebesar 92.31%.

#### 3.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp280.466.600,00 dan terealisasi sebesar Rp201.980.300,00 atau sebesar 67.34%.

### 3.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

#### 3.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp104.480.000,00 dan terealisasi sebesar Rp76.186.000,00 atau sebesar 72.92%. Pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan secara *online* dan *offline* dengan peserta terbatas mengalami beberapa kendala yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan acara.

#### 3.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan ini mendukung tugas pokok dan fungsi Bappelitbang. Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp92.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.392.800,00 atau sebesar 93.39%, masih memiliki kendala antara lain:

- Ada beberapa SKPD yang melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan oleh Bappelitbang
- Untuk rapat-rapat koordinasi dengan SKPD terkendala karena pandemi Covid-19
- Format yang diisi oleh SKPD belum terisi dengan benar.

**Solusi** yang ditawarkan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian yaitu:

- Dalam penjadwalan harus dikoordinasikan dengan SKPD melalui Mitra Kerja bidang Bappelitbang agar pelaporan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD tepat waktu.
- Untuk rapat - rapat koordinasi pada saat pandemi bisa dilakukan melalui Video Conference dan offline dengan protokol kesehatan yang ketat.
- Melakukan sosialisasi kembali agar pengisian format hasil pelaksanaan evaluasi terhadap hasil renja SKPD terisi dengan benar.
- Proses kerjasama dengan BPS akan dilaksanakan pada awal tahun.
- Permintaan Data dari SKPD biasa dilakukan dengan mengambil data langsung dari SKPD terkait.
- Mengikuti Bimtek peraturan-peraturan terkait perencanaan dan pengendalian.

**Manfaat** dari Pelaksanaan Program Perencanaan dan Pengendalian ini adalah:

- Selarasnya sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah;

- Program prioritas Kepala Daerah tahun 2022 terakomodir dalam RPJMD;
- Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan pada tahun berkenaan sebesar 100 persen.

**Kendala** dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

- Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan berjalan lambat karena kegiatan yang bersifat koordinasi dengan SKPD terkait penyusunan perencanaan anggaran dan koordinasi realisasi capaian rencana kerja dan secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan.
- Adanya refocusing anggaran sehingga monitoring dan evaluasi capaian target dan realisasi kinerja SKPD tidak maksimal.

Program ini juga telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang “meningkatkan kualitas perencanaan”.

#### IV. Program Penelitian dan Pengembangan

Implementasi Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin berbasis penelitian Ilmiah dilatar belakangi oleh adanya permasalahan/isu-isu strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bidang Litbang memiliki fungsi dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis kinerja/outcome. Dengan slogan “*We Are Contribute For Tapin Research Development And Innovation*” Bidang Litbang melaksanakan tugas dalam Penelitian ilmiah dan Inovasi yang diperlukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan/isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Sasaran strategis pada Bidang Litbang adalah “Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti” dengan indikator persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti. Manfaat dari program ini yaitu menghasilkan berbagai rekomendasi hasil kebijakan yang digunakan oleh SKPD, masyarakat dan stakeholder terkait dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah. Program ini mendukung tercapainya sasaran strategis Bappelitbang yaitu “Meningkatnya Hasil Kelitbangan” Namun demikian dalam penguatan fungsi kelitbangan dan pelaksanaan program masih terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Waktu penelitian dan cakupan lokasi penelitian yang cukup luas sedangkan lama waktu penelitian hanya 4 bulan.
2. Data sekunder yang sangat terbatas terutama untuk data-data yang bersifat mikro dengan basis unit wilayah terkecil yaitu desa, sehingga hasil penelitian masih cukup bias hanya mengandalkan data interpolasi berbasis wilayah kecamatan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan *primary data collection* dengan metode pengambilan sampling sesuai dengan teknik analisis yang diperlukan dalam penelitian.

3. Litbang masih belum memiliki data citra satelit resolusi tinggi padahal data tersebut sangat diperlukan untuk menyusun rekomendasi strategi perencanaan pembangunan daerah berbasis *regional science*.
4. Sumber daya manusia yang masih terbatas dikarenakan litbang tapin masih belum memiliki fungsional peneliti untuk menunjang penguatan fungsi litbang daerah.

Pelaksanaan program di Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah berupa hasil penelitian/kajian maka *outcome* yang dihasilkan berupa kajian-kajian yang mana rekomendasinya ditujukan kepada SKPD terkait, yang akan ditindak lanjuti pada tahun 2022. Program ini juga telah mendukung tercapainya sasaran rencana strategis Bappelitbang “meningkatkan hasil kelitbang” dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

#### 4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

##### 4.1.1. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja, dengan total pagu sebesar Rp166.385.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp134.085.200,- Atau 80.59% dari anggaran.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen ROAD MAP SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024, Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini mengambil tema meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin, kegiatan ini dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor 050/337-Litbang/Bappelitbang/2022 dan Nomor :800/486-set 3/Balitbangda, dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.000.000,-. Dokumen Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini dapat didownload secara gratis pada website [www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id).

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini selama tahun 2022 kendala yang dihadapi dari adalah:

- Keterbatasan waktu penelitian yang cukup singkat maksimal hanya 4 bulan.
- Hasil penelitian memiliki ruang lingkup yang terbatas sehingga rekomendasi yang dihasilkan juga terbatas pada tema tertentu.
- Jumlah sampling penelitian untuk data primer terbatas sedangkan wilayah penelitian cukup luas.
- Lamanya proses review untuk naskah publikasi penelitian

#### 4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi ini didukung oleh 2 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp310.905.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp245.202.000,- atau 78,87% dari anggaran.

##### 4.2.1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Nomor 050/60Litbang/Bappelitbang/2022-Nomor 9/UN8.1.23/KS/2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.96.000.000,-. Adapun penelitian yang dihasilkan adalah berupa konsep spasial Pemetaan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Jasa ekosistem Penyediaan Pangan dan Air di Kabupaten Tapin. Kegiatan ini menghasilkan 1 penelitian yang dapat didownload secara gratis pada website [www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id) dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



##### 4.2.2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung Jasa Konsultan Perorangan yang terdiri atas Belanja Jasa Tenaga Ahli Agribisnis Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 31.775.000,00 dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Ilmu Ekonomi Pertanian Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 31.775.000,00. Kegiatan ini menghasilkan 1 penelitian yang berjudul Kajian Pengembangan Food Estate Kabupaten Tapin yang dapat didownload secara gratis pada website [www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id) dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



#### 4.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, dengan total pagu sebesar Rp816.539.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp638.373.700,- atau 78,18% dari alokasi anggaran yang ada. Rincian sub kegiatan pendukung kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi ini adalah:

##### 4.3.1. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Pada kegiatan ini jumlah penelitian yang dihasilkan ada 2 tema. Kegiatan pertama adalah melalui Pengadaan Langsung kepada PT. DIGITAMA SINERGI INDONESIA untuk kegiatan Penyusunan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 94.205.700,00 dan Penyusunan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 94.182.000,00. Kedua kegiatan ini menghasilkan 3 buku penelitian dan dapat didownload secara gratis pada website [www.estarlitbang.tapinkab.go.id](http://www.estarlitbang.tapinkab.go.id) dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:



Kegiatan kedua adalah tindak lanjut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola Antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tapin Dan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor: 050/50-Litbang/Bappelitbang/2022- Nomor: 232/PL40/TU/2022 melalui Kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kabupaten Tapin dengan nilai kontrak Rp. 160.000.000,- . Kedua kegiatan ini menghasilkan 4 buku penelitian dan dapat didownload secara gratis pada website [www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id) dengan tampilan hasil penelitian sebagai berikut:





Uji coba hasil replikasi inovasi yang dtelah dilaksanakan di desa sei Bahalang dan desa Suato Baru. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan ini selama tahun 2022 adalah Keterbatasan anggaran dalam uji coba inovasi.

#### 4.3.2. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil kelitbangan dilaksanakan melalui penyusunan dokumen ROAD MAP SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024. Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini mengambil tema “Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Tapin”, kegiatan ini dilaksanakan melalui Nota Kesepahaman pengadaan melalui swakelola antara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor 050/337-Litbang/Bappelitbang/2022 dan Nomor:800/486-set 3/Balitbangda, dengan nilai kontrak sebesar Rp.48.000.000,-. Dokumen Road Map SIDA Kabupaten Tapin Tahun 2022-2024 ini dapat didownload secara gratis pada website [www.e-starlitbang.tapinkab.go.id](http://www.e-starlitbang.tapinkab.go.id).

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan rencana kerja Bappelitbang tahun anggaran 2022 dan capaian Rencana Strategis Bappelitbang sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut (terlampir).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbang

Analisis kinerja pelayanan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin bukan kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat, namun kinerja pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah terkait misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin” Mengedepankan prinsip *good governance* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ” adalah *menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjalankan fungsi Bappelitbang dengan berdasarkan 14 prinsip good governance, yaitu 1)Wawasan ke Depan, 2)Keterbukaan dan Transparansi, 3)Partisipasi Masyarakat, 4)Akuntabilitas, 5)Supremasi Hukum, 6)Demokrasi, 7)Profesionalisme dan Kompetensi, 8)Daya Tanggap, 9)Keefisienan dan Keefektifan, 10) Desentralisasi, 11)Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat, 12)Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan, 13)Komitmen pada Lingkungan Hidup, dan 14)Komitmen Pasar yang Fair.*

Ada dua indikator kinerja sasaran dan lima Indikator Kinerja Utama pada Bappelitbang Kabupaten Tapin yang dilaksanakan pada Tahun 2022 yang dijabarkan kedalam 4 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang diharapkan dapat membantu

pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan dan sekiranya dapat membantu dalam proses pengambilan kebijakan. Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang ditetapkan Bappelitbang dapat dilihat pada tabel 2.2.:

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan  
Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONNAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	-	-	90%	90%	100%	100%	-	-	-	-	-
2	Persentase capaian kinerja SKPD	-	-	90%	90%	100%	100%	-	-	-	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan	-	-	90%	80%	100%	100%	-	-	-	-	-
<b>Indikator Kinerja Utama Perubahan</b>												
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	-	Score 6,2	Score 8,1	Score 8,1	Score 6,2	Score 6,68	Score 8,1	Score 7,2	
2	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	-	-	-	80%	90%	100%	93,64%	124,27%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONNAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	-	-	-	80%	90%	100%	116,68	93,59	100%	100%	
4	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	-	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase hasil kelitbangan yang disitasi	-	-	-	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappelitbang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan di Bidang Sosial Budaya dan SDM;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappelitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan melaksanakan amanat perundang-undangan secara optimal, maka dalam penyusunan rencana kerja perlu memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dan penganggaran daerah dengan evaluasi serta pengendalian pembangunan;
2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat;
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (*e-planning*) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya, agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.
4. Peningkatan kesadaran aparatur terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
5. Peningkatan kesadaran aparatur terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
6. Kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbang) belum berjalan dengan baik.

### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd

*Review* terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappelitbang, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbang

berdasarkan Rancangan Akhir RKPD. *Review* terhadap rancangan akhir RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.3. sebagai berikut (terlampir).

## **2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat**

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa usulan perencanaan pembangunan yang diusulkan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Perangkat Daerah, merupakan sistem pendekatan perencanaan bawah atas (*bottom -up planning*) yang didasarkan atas azas demokrasi dan desentralisasi, selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodir usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan tidak ada menerima atau menelaah usulan program ataupun kegiatan yang berasal langsung dari pemangku kepentingan. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel 2.4. sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Tapin**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6

NIHIL

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

##### **3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (rancangan awal). RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema dari RKP 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan BerkeadilanPercepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
3. Penguatan Daya Saing Usaha.
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas.
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah pusat untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.



Berdasarkan RKP 2024, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,7%. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan diharapkan pada posisi 6,5% sampai dengan 7,5%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5% hingga 5,7%, rasio gini 0,374 hingga 0,377, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27%, Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NPN) sebesar 110.

### **3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat atas pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025. Dalam lima tahun rencana program kerja kedepan, Visi Kalimantan Selatan MAJU, yaitu Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan. Adapun MISI pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 yaitu:

1. Membangun SDM yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
3. Memperkuat sarana dan prasarana dasar dan perekonomian.
4. Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik.
5. Menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat ketahanan bencana.

Fokus pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 diantaranya, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Hilirisasi Industri, Infrastruktur, Transformasi Digital di sisi tata kelola pemerintahan serta pembangunan lingkungan dan ketahanan bencana. Fokus pertama di sisi pendidikan berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia, kemudian, mentransformasi untuk memanfaatkan digital yang tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari segi infrastruktur, yakni fokus membangun jalan-jalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan-kawasan industri di Batulicin maupun Banjarbakula. Kemudian, membangun dan mendorong kemajuan industri, tidak hanya sebatas menjual batubara mentah saja, menjual CPO saja atau pun menjual karet saja, tapi industri turunannya. Kemudian masalah lingkungan, seperti pengendalian tingkat pencemaran air Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dikategori sedang, dan menjaga kelestarian hutan salah satunya melalui geopark meratus dan penghijauan serta pengendalian banjir.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANG**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2024 sedangkan sasaran merupakan bagian yang integral dalam perencanaan organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbang Kabupaten Tapin yaitu:

- Tujuan Bappelitbang jangka menengah:
  - 1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
  - 2) Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan
  - 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Sasaran Bappelitbang jangka menengah:
  - 1) Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah.
  - 2) Meningkatnya hasil kelitbangan.
  - 3) Meningkatnya capaian (LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Sehingga Tujuan dan sasaran serta target indikator sasaran untuk dilaksanakan pada tahun 2024 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

**Tabel 3.1.**

**TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANG KAB. TAPIN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
				2024	KONDISI AKHIR PERIODE
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,35	80,65
		Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Komponen AKIP	24,85 23,50 11,00 19,00	25,15 24,00 11,50 20,00
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	7,75	8,2
		Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah	Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	100%	100%
			Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama SKPD	100%	100%
3	Meningkatkan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan		Indeks Inovasi Daerah	62,00	70,00
		Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Persentase inovasi Daerah yang memenuhi syarat IGA	100%	100%
		Meningkatnya hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	100%	100%

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dijabarkan Bappelitbang ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Bappelitbang Kabupaten Tapin. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bappelitbang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbang Kabupaten Tapin yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta prognosinya dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut (terlampir).

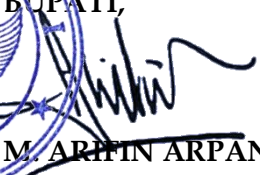
## BAB V


### PENUTUP

Rencana Kerja BappeLitbang Kabupaten Tapin tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BappeLitbang 2024-2026 dan dokumen RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Awal tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BappeLitbang Kabupaten Tapin. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Bappelitbang, penyusunan Rencana Kerja 2024 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Bappelitbang maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin Tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Tahun 2024.

Rantau, Juni 2023  
BUPATI,  
  
M. ARPIN ARPAN



# LAMPIRAN

Tabel 2.1.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022  
Kabupaten Tapin  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/kota s.d. tahun 2022 (%)		
				7		8		9		10		11		12		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		5.01.01 PROGRAM PENJANGKURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN Bappellitbang	80,00	Persen	8.611.706.645	80	%	6.586.070.058,00	100	76,51	80	%	6.586.070.058	100,00	76,51
1		5.01.01.2.01 Peencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80	Persen	46.700.000	80	Persen	37.267.200	100	79,80	80	Persen	37.267.200	100,00	79,80
2		5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Bulan	32.050.000	12	Bulan	27.148.800,00	100,00	84,71	12	Persen	27.148.800	100,00	84,71
		5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pada Bappellitbang	13	Dokumen	14.650.000	13	Dokumen	10.118.400,00	100,00	69,07	13	Persen	10.118.400	100,00	69,07
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	100,00		76,89					
								Predikat Kinerja Sub Kegiatan	ST		T					
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90	%	4.938.811.729	100	%	4.040.755.676,00	111,11	81,82	100	%	4.040.755.676	111,11	81,82
		5.01.01.2.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu lnsediannya Gaji Dan Tunjangan ASN	12	Bulan	4.907.407.829	12	Bulan	4.019.165.376	100,00	81,90	12	Bulan	4.019.165.376	100,00	81,90
		5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Waktu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Bulan	24.803.300	12	Bulan	18.750.300	100,00	75,59	12	Bulan	18.750.300	100,00	75,59
		5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trinidasi/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semester Bappellitbang	1	laporan	6.600.000	1	laporan	2.840.000	100,00	43,03	1	laporan	2.840.000	100,00	43,03
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	100,00		66,84					
								Predikat Kinerja Sub Kegiatan	ST		S					
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	%	2.525.753.600	100	%	1.686.164.824,00	100	66,76	100	%	1.686.164.824	100,00	66,76
		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	12	Bulan	18.389.600	12	Bulan	1.054.000	100	5,73	12	Bulan	1.054.000	100,00	5,73
		5.01.01.2.06.02 Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan perabotan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	455.887.300	12	Bulan	246.360.400	100	54,04	12	Bulan	246.360.400	100,00	54,04
		5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan bahan logistik kantor	12	Bulan	161.618.500	12	Bulan	102.765.800	100	63,60	12	Bulan	102.765.800	100,00	63,60
		5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Waktu penyediaan barang cetak dan pengandaian	12	Bulan	29.218.400	12	Bulan	20.289.100	100	69,44	12	Bulan	20.289.100	100,00	69,44
		5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan / Material	Waktu lnsediannya bahan material	12	Bulan	27.626.200	12	Bulan	17.912.400	100	64,84	12	Bulan	17.912.400	100,00	64,84
		5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kurjungan Tamu	Waktu Tersedianya Fasilitas Kurjungan Tamu	12	Bulan	18.750.000	12	Bulan	18.750.000	100	100,00	12	Bulan	18.750.000	100,00	100,00
		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	1.814.273.000	12	Bulan	1.279.013.124	100	70,50	12	Bulan	1.279.013.124	100,00	70,50
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	100,00		61,16					
								Predikat Kinerja Sub Kegiatan	ST		R					

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota s.d. Tahun 2022 (%)	
					7	8	9	10	11	12	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		5.01.01.2.06 Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	100	100	483.953.123	%	111,11	81,36	100,00	483.953.123	%	81,36	
		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Air dan Listrik	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	12	12	401.693.123	Bulan	100	82,38	100,00	401.693.123	Bulan	82,38	
		5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengecatan Kendaraan	waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	12	12	13.710.000	Bulan	100	96,50	100,00	13.710.000	Bulan	96,50	
		5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	68.550.000	Bulan	100	73,73	100,00	68.550.000	Bulan	73,73	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						100,00	84,20					
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan						ST	T					
		5.01.12.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	90	90	262.220.000	%	100,00	%	100,00	262.220.000	%	%	
18		5.01.01.2.07.06 Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin yang tersedia	33	33	33	262.220.000	unit	100,00	81,92	100,00	262.220.000	unit	81,92	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						101,59	83,35					
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan						ST	T					
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	100	100	78.709.225	%	83,33	42,42	75	78.709.225	%	42,42	
19		5.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	9	9	9	66.635.465	Unit	100,00	46,22	9	66.635.465	Unit	46,22	
20		5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12	12	12	11.673.750	Bulan	100,00	28,98	12	11.673.750	Bulan	28,98	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						100,00	37,60					
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan						ST	SR					
			Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)						101,11	70,43					
			Predikat Kinerja Kegiatan						ST	S					
			1. Indeks Kualitas Perencanaan	1. 8.1					75	74,17	75	611.299.200	1.326.862.900	75,00	74,17
			2. Rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	2. 90					100	61,299.200	100	888.817.500	1.326.862.900	100,00	75,19
20		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	1.175.412.600	%	100	0,00	0	0	0	0,00	
21		5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Pemeliharaan, dan Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Pemeliharaan dan Strategi Pembangunan Daerah	1	1	1	17.246.000	Dokumen	0	0	0	0	0	0,00	
22		5.01.02.2.01.04 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	3	3	3	37.213.600	Kali	100	100,00	3	37.213.600	Kali	100,00	
23		5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang KabupatenKota	Jumlah Musrenbang KabupatenKota	1	1	1	135.337.000	kali	100	97,00	1	135.337.000	kali	97,00	
24		5.01.02.2.01.06 Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Koordinasi persiapan Musrenbang Kecamatan	12	12	12	224.828.800	kecamatan	100	99,67	12	224.828.800	kecamatan	99,67	
		5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Pembangunan Daerah KabupatenKota	Waktu Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKota	12	12	12	486.438.100	Bulan	100	64,36	12	486.438.100	Bulan	64,36	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						80,00	72,20					
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan						T	S					
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						80,00	67,34	80	280.466.600	%	67,34	
25		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemeliharaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	416.490.300	%	80,00	67,34	80	280.466.600	%	67,34	
26		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Waktu Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	12	12	12	197.994.600	Bulan	100	92,31	12	197.994.600	Bulan	92,31	
		5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemantauan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Waktu Pelaksanaan Pembinaan dan pemantauan data dan informasi Perencanaan pembangunan SKPD	12	12	12	201.960.300	Bulan	100	40,83	12	201.960.300	Bulan	40,83	
			Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)						100,00	68,17					
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan						0	S					



No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota Tahun Berjalan 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2022 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah KabupatenKota s.d. Tahun 2022 (%)	
				7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	80	%	195.990.000	80	%	162.578.800	80	%	162.578.800	100,00
27		5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di KabupatenKota	Jumlah laporan capaian pembangunan daerah	4	Laporan	104.480.000	4	Laporan	76.166.000	4	Laporan	76.166.000	100,00
28		5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyesuaian Laporan Berbasis Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	4	Laporan	92.510.000	4	Laporan	86.392.800	4	Laporan	86.392.800	100,00
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	100,00			83,15	
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	0	T			
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	93,33	75,02			
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	ST	S			
				1, 8,1 2, 90		1.138.771.500	100%		828.855.400	100	%	828.855.400	75,00
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Indeks Kualitas Perencanaan										
		5.01.03.2.01 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	1.100% 2. 90%	Persen	422.864.800	100	Persen	271.081.100	100	Persen	271.081.100	100,00
		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RP, RPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	1	Dokumen	77.350.000	12	Dokumen	56.448.800	12	Dokumen	56.448.800	1200,00
29		5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	4	Laporan	69.850.000	4	Laporan	44.610.000	4	Laporan	44.610.000	100,00
		5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	12	Bulan	43.700.000	12	Bulan	33.562.500	12	Bulan	33.562.500	100,00
32		5.01.03.2.01.05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP, RPJ, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah kompilasi dokumen perencanaan pembangunan SKPD mitra Sub Bidang Sosial	1	Dokumen	103.594.800	12	Dokumen	59.633.700	12	Dokumen	59.633.700	1200,00
33		5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Sosial	4	Laporan	79.820.000	4	Laporan	43.935.000	4	Laporan	43.935.000	100,00
34		5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Waktu pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mitra Sub Bidang Sosial	12	Bulan	48.550.000	12	Bulan	32.890.100	12	Bulan	32.890.100	100,00
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	466,67			65,67	
								Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)	ST	R			





Tabel 2.3.  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2024  
KABUPATEN TAPIN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PEMERINTAHAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PEMERINTAHAN	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10		8	22.104.752.246,00	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	10		8	22.104.752.246,00
	5.01	PERENCANAAN				18.747.875.046,00	PERENCANAAN				18.747.875.046,00
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.994.266.573,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.994.266.573,00
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)		100	148.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)		100	148.200.000,00
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase usulan program, kegiatan, subkegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase usulan program, kegiatan, subkegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100	
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappellitbang	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappellitbang	100	
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100	
5.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)		5.00	80.700.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)		5.00	80.700.000,00
			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00	
5.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(KAB. TAPIN)		11.00	67.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(KAB. TAPIN)		11.00	67.500.000,00
			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11.00			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11.00	
5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN), (KAB. TAPIN)		100	5.296.774.201,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN), (KAB. TAPIN)		100	5.296.774.201,00
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%)	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan (%)	100	
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (%)	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti (%)	100	

NO	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25.00	5.235.274.201,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8	5.235.274.201,00
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.00	30.000.000,00
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.00	31.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.00	31.500.000,00
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Skor)	4.3	2.972.492.372,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sekretariat (Skor)	4.3	2.972.492.372,00
				Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100				Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100	
				Persentase kelulusan ASN Bappellitbang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN (%)	100				Persentase kelulusan ASN Bappellitbang yang mengikuti Peningkatan Kapasitas ASN (%)	100	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	99.800.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12.00	99.800.000,00
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	145.500.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	145.500.000,00
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	239.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	239.000.000,00
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	47.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(KAB. TAPIN) (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	47.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	KODE	URUSAN/BIDANG		LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	
		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB										
1	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	10.000.000,00		
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	(KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	342.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	12	342.000.000,00		
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	23.793.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	23.793.000,00		
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.055.399.372,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	2.055.399.372,00		
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	5.000.000,00		
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	5.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.00	5.000.000,00		
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100	905.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (%)	100	905.500.000,00		
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(KAB. TAPIN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10.00	905.500.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10.00	905.500.000,00		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat. (%)	100	1.142.300.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekretariat. (%)	100	1.142.300.000,00		
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(KAB. TAPIN)			688.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(KAB. TAPIN)			688.000.000,00		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(KAB. TAPIN)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	270.300.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	270.300.000,00
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(KAB. TAPIN)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	184.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	184.000.000,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(KAB. TAPIN)		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen) (%)	100	529.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen) (%)	100	529.000.000,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(KAB. TAPIN)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	377.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	377.000.000,00
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(KAB. TAPIN)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	152.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	152.000.000,00
2. 5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%) Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (%)	100 80	5.033.514.485,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%) Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (%)	100 80	5.033.514.485,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	(KAB. TAPIN)		Persentase Program RP-JMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya (%)	100	2.719.611.167,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	(KAB. TAPIN)	Persentase Program RP-JMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya (%)	100	2.719.611.167,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Meka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	295.443.200,00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Meka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2	295.443.200,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1.00	300.000.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1.00	300.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.00	285.915.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.00	285.915.000,00	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1.00	590.805.000,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	(KAB. TAPIN)	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1.00	590.805.000,00	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	405.00	382.506.757,00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	405.00	382.506.757,00	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMID/RKPD) (Dokumen)	3.00	894.941.210,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMID/RKPD) (Dokumen)	3.00	894.941.210,00	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)	100	898.731.000,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)	100	898.731.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)		341.015.000,00	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN)	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas (Persentase)		341.015.000,00	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1.00			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1.00	
5.01.02.2.02.0002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	(KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	53	557.716.000,00		(KAB. TAPIN)	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	53	557.716.000,00
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	(KAB. TAPIN), (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai (Persentase)	100	1.415.172.318,00		(KAB. TAPIN), (Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai (Persentase)	100	1.415.172.318,00
5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1.00	830.000.000,00		(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1.00	830.000.000,00
5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1.00	585.172.318,00		(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	1.00	585.172.318,00
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.720.093.988,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.720.093.988,00
				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (%)	100				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (%)	100	
				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (%)	90				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (%)	90	
				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti (%)	100				Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti (%)	100	
				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (%)	90				Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (%)	90	
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)		100	930.539.700,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)		100	930.539.700,00
			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti (%)	100		(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti (%)	100		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9
			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90	
			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90	
			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti (%)	100			(Bappeilbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti (%)	100	
5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)			151.193.000,00		(KAB. TAPIN)			151.193.000,00
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	
5.01.03.2.01.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(KAB. TAPIN)			101.807.000,00		(KAB. TAPIN)			101.807.000,00
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	
5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	(KAB. TAPIN)			70.840.200,00		(KAB. TAPIN)			70.840.200,00
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	
5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	(KAB. TAPIN)			150.000.000,00		(KAB. TAPIN)			150.000.000,00
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)			153.600.000,00		(KAB. TAPIN)			153.600.000,00
			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	108.032.100,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	108.032.100,00
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	70.067.400,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	70.067.400,00
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)			125.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	(KAB. TAPIN)			125.000.000,00
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1.231.441.248,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1.231.441.248,00
			(KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	90	
			(KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	100			(Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (%)	100	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)			162.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)			162.000.000,00
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2			(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	
			(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	129.825.200,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1	129.825.200,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	5.01.03.2.02.0003	5.01.03.2.02.0003	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	4	97.582.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	8	97.582.000,00
	5.01.03.2.02.0004	5.01.03.2.02.0004	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	1	150.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perencanaan (Laporan)	1	150.000.000,00
	5.01.03.2.02.0005	5.01.03.2.02.0005	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	682.034.046,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	682.034.046,00
	5.01.03.2.03	5.01.03.2.03	(KAB. TAPIN), (Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90	558.113.040,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	(KAB. TAPIN), (Bappellitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%)	90	558.113.040,00
	5.01.03.2.03.0001	5.01.03.2.03.0001	(KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (%)	100	161.545.960,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(KAB. TAPIN)	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (%)	100	161.545.960,00
	5.01.03.2.03.0002	5.01.03.2.03.0002	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	125.811.000,00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	125.811.000,00
			(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1			(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	5.01.03.2.03.0003	5.01.03.2.03.0003	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	4	120.848.000,00	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	4	120.848.000,00	
	5.01.03.2.02.0004	5.01.03.2.02.0004	(KAB. TAPIN)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Kabupaten Tapin)	1	149.908.080,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Kabupaten Tapin)	1	149.908.080,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.356.877.200,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.356.877.200,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.356.877.200,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				3.356.877.200,00	
				Persentase inovasi daerah yang diaplikasikan (%)	100				Persentase inovasi daerah yang diaplikasikan (%)	100		
				Persentase rekomendasi kearifan yang ditindaklanjuti (%)	100				Persentase rekomendasi kearifan yang ditindaklanjuti (%)	100		
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	(KAB. TAPIN)	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (%)	100	660.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	(KAB. TAPIN)	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (%)	100	660.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0001	5.05.02.2.02.0001	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial (Dokumen)	1.00	215.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial (Dokumen)	1.00	215.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0003	5.05.02.2.02.0003	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1.00	230.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	1.00	230.000.000,00	
	5.05.02.2.02.0006	5.05.02.2.02.0006	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1.00	215.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	1.00	215.000.000,00	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	(KAB. TAPIN)			1.179.577.200,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	(KAB. TAPIN)			1.179.577.200,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKP				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI		INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024
1	2		10	4	8	9		10	4	8	9
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (%)	100	215.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (%)	100	215.000.000,00
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1.00	354.577.200,00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1.00	354.577.200,00
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1.00	265.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1.00	265.000.000,00
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1.00	230.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1.00	230.000.000,00
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1.00	115.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	1.00	115.000.000,00
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(KAB. TAPIN)	Persentase Inovasi Daerah yang dihimpun dalam database Inovasi daerah (%)	100	1.577.300.000,00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	(KAB. TAPIN)	Persentase Inovasi Daerah yang dihimpun dalam database Inovasi daerah (%)	100	1.577.300.000,00
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1.00	462.200.000,00	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1.00	462.200.000,00
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(KAB. TAPIN)	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		471.000.000,00	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	(KAB. TAPIN)			471.000.000,00

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING		
	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	10	4	8	9	3	10	4	8	9		
			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1.00			(Bappellitbang, KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1.00			
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1.00	270.000.000,00	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1.00	270.000.000,00		
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1.00	314.100.000,00	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	(KAB. TAPIN)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1.00	314.100.000,00		
			<b>J U M L A H</b>									<b>22.104.752.246,00</b>	

Tabel 4.1.  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Tapin  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
5		UNSUBUR PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN						22.104.752.246,00						10.398.206.964,00	
5.01		PERENCANAAN						18.747.875.046,00						10.053.206.964,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.994.266.573,00						7.420.063.964,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan
			Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% (%) Rate-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat (%) Persentase efisiensi penggunaan anggaran (%)	90 100 90											
5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						148.200.000,00	(KAB. TAPIN)					30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan
			Persentase usulan program, kegiatan, subkegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:Persen) (%) Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang (Dengan Satuan:Persen) (%) Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu (Dengan Satuan:%) (%)	100 100 100					(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN) (Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN) (Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)				100 100 100		
5.01.01.2.01.0 001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.700.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD				30.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.00 0.00	5.00	0.00	5.00							5.00	
5.01.01.2.01.0 006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						67.500.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD				-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9 11.00	9	9	11.00							11.00	
5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.286.774.201,00	(KAB. TAPIN), (KAB. TAPIN)					5.285.063.964,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembangunan





NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.01.2.06.0 002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	12	145.500.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	425.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	12	239.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		0.00	12	47.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		0.00	1	10.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	1	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		0.00	12	342.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		0.00	12	23.793.000,00	(KAB, TAPIN)		Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	15.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		0.00	12	2.055.399.372,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	12	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 010		Penalauasaan Atsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penalauasaan Atsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		0.00	5	5.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	5	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	
5.01.01.2.06.0 011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		0.00	1.00	5.000.000,00	(KAB, TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belavanan publik	1.00	5.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoebanaan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen) (%)				905.500.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	100	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.07.0 006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0.00	52.00		905.500.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	10.00	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan sekreterai. (Dengan Satuan:%) (%)				1.142.300.000,00 (KAB. TAPIN)	(KAB. TAPIN)				100	675.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.08.0 002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0.00	1.00		688.000.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	12.00	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.08.0 003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	12		270.300.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	12	125.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.08.0 004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0.00	12		184.000.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	12	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen) (%)				529.000.000,00 (KAB. TAPIN)	(Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)				100	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.09.0 001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0.00	10		377.000.000,00 (KAB. TAPIN)	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik	10	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
5.01.01.2.09.0 006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					152.000.000,00 (KAB. TAPIN)		PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada belayanan oublik		-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0.00	1	20	5.033.514.485,00	(Bappelitbang, KAB. TAPIN)			20	1.785.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan		
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (%) Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti (%)			100									
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					2.719.611.167,00	(KAB. TAPIN)				100	1.245.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pencembanaan	
	5.01.02.2.01.0 001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya (Dengan Satuan:Persen) (%)	0.00	2	2	295.443.200,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	3	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0 003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Mlaka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0.00	0.00	1.00	300.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2.00	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	0.00	1	1.00	255.915.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2.00	60.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0 005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0.00	1	1.00	590.805.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
	5.01.02.2.01.0 006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	0.00	0.00	405.00	382.506.757,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	405.00	225.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.02.2.01.0 007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD) (Dokumen)		0.00	0.00	3.00	894.941.210,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2.00	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintahan daerah yang berkualitas (Persentase)				100	898.731.000,00	(KAB. TAPIN)				100	270.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pemoembantuan
5.01.02.2.02.0 001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	341.015.000,00	(Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02.2.02.0 002		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)		0.00	0.00	53	557.716.000,00	(Kab. Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	53	120.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan capaian kinerja program prioritas daerah yang tercapai (Persentase)				100	1.415.172.318,00	(KAB. TAPIN)				100	270.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02.2.03.0 001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)		0.00	0.00	1.00	830.000.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	170.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.02.2.03.0 003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						585.172.318,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik		100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)  Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti (%)  Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM (%)  Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra konomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti (%)  Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang ekonomi dan Infrastruktur (%)	0.00	0.00	1.00	2.720.093.988,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)			1.00	848.143.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) (%) Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen) (%) Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen) (%) Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) (%)			100	930.539.700,00	(KAB. TAPIN)			100	413.143.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
5.01.03.2.01.001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	3	2	151.193.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2	63.143.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.03.2.01.0 002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		0.00	0.00	1	101.807.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0 003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)		4	4	4	70.840.200,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	4	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0 004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)		0.00	0.00	1	150.000.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0 005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		2	2	3	153.600.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0 006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		0.00	0.00	1	108.032.100,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
5.01.03.2.01.0 007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		4	4	4	70.067.400,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	4	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.03.2.01.0 008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)		0.00	0.00	125.000.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)  Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) (%)				1.231.441.248,00	(KAB. TAPIN)				90	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pendoembinaan	
5.01.03.2.02.0 001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		2	2	162.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.0 002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		0.00	0.00	129.825.200,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.0 003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)		4	4	97.582.000,00	(Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	4	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.02.0 004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)		0.00	0.00	150.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Perekonomian dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.01.03.2.03.005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		0.00	0.00	682.034.048,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Infrastruktur yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen) (%)  Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi sipd mitra sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Persen) (%)				558.113.040,00	(KAB. TAPIN), (RT.001-004/RW.001-002, Rawana, (Bappelitbang Kab. Tapin, KAB. TAPIN)				90	175.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Penguembinaan	
5.01.03.2.03.001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)		2	2	161.545.960,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	2	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		0.00	0.00	125.811.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		4	4	120.848.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	4	35.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.01.03.2.03.004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Rentja dengan RRPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)		0.00	0.00	149.908.060,00	(KAB. TAPIN), (RT.001-004/RW.001-002, Rawana, Kecamatan Laras (Kabupaten Tapin, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1	40.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang direplikasi (%) Persentase rekomendasi kelibangan yang ditindaklanjuti (%)				100	3.356.877.200,00				345.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen) (%)				100	660.000.000,00	(KAB. TAPIN)			75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.02.0	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1			1.00	215.000.000,00	(KAB. TAPIN)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.02.0	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0.00			1.00	230.000.000,00	(KAB. TAPIN)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.02.0	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0.00			1.00	215.000.000,00	(KAB. TAPIN)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase penelitian di bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi yang terpublikasi (Dengan Satuan:Persen) (%)				100	1.179.577.200,00	(KAB. TAPIN)			125.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		
	5.05.02.2.03.0	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0.00			1.00	215.000.000,00	(KAB. TAPIN)	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pembinaan		

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH			
5.05.02.2.03.0 004		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	354.577.200,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.03.0 005		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	285.000.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.03.0 007		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	230.000.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.03.0 011		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	115.000.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang dihimpun dalam database inovasi daerah (Dengan Satuan:Persen) (%)				100	1.517.300.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)				100	145.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.04.0 001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0.00	0.00	1.00	462.200.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.04.0 002		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		0.00	1.00	1.00	471.000.000,00 (KAB. TAPIN)  (Bappelitbang, KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Poluhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	1.00	20.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
5.05.02.2.04.0 004		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibangan (Laporan)		1	1	270.000.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	75.000.000,00	1.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
5.05.02.2.04.0 005		Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0.00	0.00	314.100.000,00	(KAB. TAPIN)	PAD	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik	25.000.000,00	1.00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	
<b>J U M L A H</b>							<b>22.104.752.246,00</b>					<b>10.398.206.964,00</b>			